

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN

Siti Asadah Hijriwati dan Esmara Sugeng (Fakultas Hukum Univ. pekalongan)

Abstract

IPR is a right that arises as a result of human creative action menghasilkan innovative works that can be applied in human life. As an exclusive rights, Protection of Intellectual Property Rights was originally a form of protection provided by the state of the idea or the handiwork of its citizens, and therefore the rights to the Intellectual Property is fundamentally territorial statehood. Recognition of Intellectual Property Rights protection in a country does not mean the protection of Intellectual Property Rights in other countries. Implementation provisions concerning Intellectual Property Rights have been implemented but have not been up this is due because of the perception of a diverse society on the one side are many who regard IPR has not been necessary because it would limit a person to do good to fellow humans, but there are also people who have started realizing the importance of IPRs thus sought to protect the IPR in this regard is Copyright and Trademark Rights. But in the implementation of the IPR there are also constraints that accompany the marketing system that has not been good, often change-change that motif as well as limited capital and human resources.

Key words: Intellectual Property Rights, implementation and public perception.

PENDAHULUAN

Masyarakat Pekalongan tidak dapat dilepaskan dari batik, karena batik merupakan urat nadi perekonomian masyarakat pekalongan, batik dan masyarakat pekalongan dapatlah diibaratkan “dua sisi mata uang”. Batik yang diusahakan oleh masyarakat Pekalongan sebagai sebuah industri dapat diusahakan dalam skala kecil berupa industry rumahan atau industry rumah tangga sebagai mata pencaharian maupun dalam skala besar sebagai sebuah perusahaan yang dikelola secara modern dengan manajemen yang baik. Sebagai tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat, industri batik pernah mengalami masa kejayaan pada dekade 1960 - 1970-an. Sampai sekarang industri batik masih menjadi tumpuan kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Pekalongan. Hasil produksi batik Pekalongan tidak hanya dipasarkan di pasar lokal saja, namun telah menembus pasar internasional.

Sebagai penyangga ekonomi rakyat yang telah menembus dunia internasional, batik Pekalongan sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena termasuk ciptaan yang dilindungi. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.(Bambang Kesowo;1996; 3)

TRIPs merupakan suatu norma hukum internasional yang membawa perubahan sangat berarti bagi perkembangan HKI pada umumnya, seperti masalah jangka waktu perlindungan yang makin lama, serta mengubah pandangan dan teori-teori lama HKI yang dianut berbagai negara.(Ahmad M. Ramli; 2000;13)

Bagi Indonesia, sikap dan budaya masyarakatnya kadang justru menjadi kendala dan penghalang serta sulit untuk mendukung penerapan dan penegakan hukum di bidang ini. Keadaan semacam ini harus dikoreksi dan terus diarahkan sehingga budaya menghargai HKI dapat ditegakkan secara realistis. Karena jika keadaan rendahnya penghargaan terhadap HKI ini terus berlangsung, selain akan berdampak hilangnya iklim kreatifitas, dan terlanggarnya hak-hak individu yang sangat fundamental, juga akan berakibat terkucilnya Negara dari dunia internasional. (Djauhari Oratmangun '1998;18)

Bagaimanapun sekarang Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO. Konsekuensinya, Indonesia harus menegakkan aturan-aturan standar dalam TRIPs yang antara lain berupa kewajiban aturan penegakkan dalam hukum nasionalnya masing-masing. Sebagai suatu kesepakatan internasional, TRIPs mempunyai tiga ciri pokok yaitu pertama, persetujuan TRIPs lebih menekankan kepada norma dan standar, kedua, TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI sebagai persyaratan minimal, dan ketiga TRIPs memuat ketentuan-ketentuan penegakkan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa. (Bambang Kesowo, op. cit. hal 23)

TRIPs juga memperkenalkan beberapa prinsip penting berkenaan dengan perlindungan HKI, seperti halnya Konvensi Paris, menganut prinsip *national treatment* (pasal 3) yang berarti negara peserta harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara lain seperti yang diberlakukan kepada warga negaranya sendiri. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata :1998;7)

Bagi industri berbasis kerakyatan seperti industri batik yang penuh dengan kreatifitas ketentuan-ketentuan HKI dalam TRIPs ini sangat memberikan kepastian hukum. Akan tetapi bagi kebanyakan masyarakat Pekalongan, Ciptaan atau kreatifitas mereka berfungsi sosial, dan mereka akan merasa bangga jika hasil karya mereka banyak yang meniru. Bahkan dalam era perdagangan bebas sekarang inipun penjualan hasil karya mereka dilakukan tanpa label, dan pihak pembeli dengan leluasa melakukan *llabeling* atas nama mereka. Dengan demikian kreatifitas mereka menjadi milik orang lain dengan mudah. Oleh karena itu penegakkan hukum dibidang Hak Cipta pada industri batik di Pekalongan mutlak diperlukan, mengingat seni batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Dari uraian di atas, dapat kita rumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta pada industri perbatikan di Pekalongan?
2. Kendala-kendala apa yang muncul dalam implementai tersebut?
3. Bagaimanakah persepsi masyarakat industri perbatikan di Pekalongan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sosio Legal Research*. (C.F.G. Sunaryati Hartono ; 1994 ; 142) penggunaan metode *sosio legal research* disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada

penelitian yang bersangkutan. Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan, dengan cara wawancara dengan responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka,

Pengumpulan data digunakan studi pustaka dan studi lapangan, Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data yang terkumpul ditelaah secara rinci agar dapat mendeskripsikan fokus penelitian. Pengecekan dilakukan dengan triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.(S. Nasution ; 1996 ; 32)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta pada Industri Batik di Pekalongan

Batik merupakan suatu karya seni dan tergolong ciptaan yang mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilepaskan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah :

- 1) Buku, program komputer, pamphlet perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama atau drama musical, tari atau koreografi, pewayangan atau pantomime;

- 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- 7) arsitektur;
- 8) peta;
- 9) seni batik;
- 10) fotografi;
- 11) sinematografi;
- 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Bagi industri batik di Pekalongan keharusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual harus dihadapi secara khusus, karena pada umumnya pelaku usaha dibidang batik sebelumnya tidak pernah berfikir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi-kreasi mereka berupa desain batik. Untuk itu hal yang pertama dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan adalah melaksanakan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Merek, yang sangat berkaitan sekali dengan dunia industri batik dan dikaitkan dengan diberlakukannya konsep perdagangan bebas. (Wahyu Kartiko :2009)

Apabila dilihat dari jumlah pengusaha batik yang mendaftarkan Hak Cipta dan Merek, masih banyak pengusaha yang belum antusias untuk mendapatkan hak tersebut, hal itu dapat dilihat dari jumlah pengusaha yang mempunyai Hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dan Hak Merek apabila dibandingkan dengan jumlah usaha batik yang ada dimasyarakat dimana jumlahnya mencapai 13.033 buah. Data jumlah industri batik ini sangat berbeda dengan data yang berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang hanya berjumlah sekitar 102

buah. Data jumlah pengusaha yang telah memperoleh HKI bidang merek batikipun tidak dapat diketahui dengan pasti.

Meskipun belum didaftarkan, sebetulnya para pengusaha batik sudah mengenal adanya merek untuk usaha mereka dengan tujuan agar dikenal oleh konsumen. Merek ini mereka pasang pada papan nama dengan logo-logo yang menarik. *Sebagai contoh*, Batik Larissa, Batik Feno, Batik Huza, Batik Arina, Batik Ghofar, Batik Ismania, Batik Qonita, Batik Tobal, Batik Mahkota, Batik Perti Kenanga, Batik Putri Amanda dan sebagainya.

Logo dan merek itu mereka pasang pada produk mereka berupa baju batik, daster, kemeja batik, gamis dan sebagainya. Sedangkan untuk produk batik berupa kain untuk baju, kemeja, sarung selendang maupun kerudung batik tidak dicantumkan merek dan logo mereka. Kain batik dengan motif dan desain yang bagus dan penuh kreasi itu mereka jual polos tanpa diberi tanda bahwa kain batik itu adalah desain dari rumah batik tertentu, seperti *design by Qonita* dan sebagainya. Agar pelanggan / konsumen mengenali produknya, mereka mencetak nota pembelian lengkap dengan logo serta tas maupun kardus pembungkus, dengan tujuan apabila batik itu dibeli untuk hadiah, maka yang menerfima dapat mengetahui merek mereka. Demikian juga untuk produk batik yang diekspor, hanya dibungkus dalam kemasan bertuliskan *made in Indonesia*.

Perilaku pengusaha batik yang seperti ini sebetulnya tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi produknya.. para pembeli terutama dalam partai besar dengan tujuan untuk dapat dijual kembali, dapat leluasa untuk **mengaku** kain batik tersebut sebagai desain karya mereka, dengan cara menambahkan nama mereka (pembeli) memakai teknik sablon. Dengan demikian merek-merek batik itu hanya dikenal oleh orang-orang tertentu saja, yaitu para pembeli perantara (pembeli dengan tujuan untuk dijual kembali) dan masyarakat Pekalongan sendiri. Jadi meskipun kain batik

itu produksi rumah batik Arina, maka jika dibeli oleh Batik Danar Hadi dan diberi label *Batik Danar Hadi* orang akan mengenal itu sebagai karya Danar Hadi, bukan Arina, Kusumo Asih, Qonita dan sebagainya. Tentu saja keuntungan besar akan mengalir ke Danar Hadi yang dapat menjual dengan harga tinggi karena sudah punya nama besar (Wahyu Kartiko :2009).

Kendala-kendala dalam Implementasi HKI pada Industri Batik

a. Pemasaran

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di atas, ternyata yang menjadi kendala utama adalah aspek pemasaran. Meskipun tidak tertulis antara produsen dan konsumen telah terjadi semacam perjanjian agar produk batik yang masih berupa kain tidak boleh diberi label / nama pada kainnya sehingga pembeli bisa bebas menjual kembali. Sebagai contoh, rumah batik terkenal macam Danar Hadi sering “kulakan” ke produsen-produsen batik di Pekalongan, kadang juga memesan khusus untuk Danar Hadi.

Konsep pemasaran seperti itu telah berlangsung secara turun temurun. Bagi mereka agar usaha dapat terus berlangsung konsumen merupakan hal yang sangat penting, sehingga para produsen batik ini selalu mencari bagaimana agar konsumen tetap setia untuk membeli produk mereka ditengah persaingan industri khususnya batik yang semakin ketat, meskipun mereka harus menagabaikan perlindungan hukum pada produk mereka.

b. Trend Motif.

Batik Pekalongan merupakan batik yang dinamis, terlihat dari warna yang menyala dan ragam motif yang selalu mengikuti perkembangan permintaan pasar. Perkembangan permintaan pasar akan motif-motif baru berlangsung sangat cepat. Hanya dalam waktu tidak

lebih dari tiga bulan, trend motif sudah berubah. Apabila produsen tidak segera menyikapi kondisi pasar yang demikian, maka produknya tidak akan laku karena sudah ketinggalan mode. Dampak positif dari kondisi pasar seperti ini adalah ide kreatif para pengrajin terpacu untuk menghasilkan karya-karya baru.

Tempo perubahan permintaan pasar akan motif-motif baru yang sangat cepat dan tempo pengurusan pendaftaran Hak cipta maupun Merek yang relatif lama dalam praktek, membuat para produsen batik enggan untuk mendaftarkan karya desain batik mereka. Dalam perhitungan isnis juga dikatakan tidak “cucuk” karena apabila proses pendaftaran selesai permintaan pasar sudah berubah. Jadi boleh dikatakan percuma didaftarkan, dilindungi, karena tidak ada yang akan meniru motif yang didaftarkan tersebut sebab pasar tidak menghendaki lagi.

c. Modal dan Sumber Daya Manusia

Pelaku industri batik banyak diantaranya dikerjakan oleh pengrajin batik. Para pengrajin ini mempunyai keahlian dalam membatik, namun tidak mempunyai modal untuk berusaha. Peran mereka dalam industri perbatikan adalah menjadi buruh batik pada perusahaan-perusahaan batik besar yang ada. Ditangan para buruh batik yang juga merupakan para pengrajin batik inilah berbagai ragam hias desain batik dihasilkan. Pengusaha batik dengan modal besar biasanya hanya menyerahkan motif/desain batik kepada pengrajin yang menjadi buruh mereka, kecuali motif yang sudah dipesan.

Pengrajin batik yang bekerja sebagai buruh batik diupah berdasarkan hasil yang dia peroleh perharinya, dengan nilai relatif kecil. Kehidupan pengrajin yang serba pas-pasan untuk hidup tidak memungkinkan mereka berfikir untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kreasi mereka berupa desain batik.

Persepsi Pelaku Industri Perbatikan Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Persepsi dalam kamus bahasa Indonesia, berarti Tanggapan / Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Depdiknas ; 1998). Ada juga yang mengartikan persepsi adalah pengamatan global, belum disertai kesadaran sedangkan subjek dan obyeknya belum terbedakan satu dari yang lainnya, lalu ada tanggapan (Hadani Nawawi ;1982 ; 54)

Sistem kerja dan jaringan pemasaran dalam industri batik turut mempengaruhi pola pikir mereka. Bagi kebanyakan pelaku industri batik yang termasuk golongan “wong kaji”, mereka percaya bahwa rejeki sudah ada yang mengatur. Oleh karena itu dalam “berusaha” selalu mengedepankan amal, termasuk didalamnya berbagai pengetahuan dan bekerja sungguh-sungguh. Pola bekerja ini mempengaruhi persepsi mereka mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Karya cipta bagi mereka dianggap sebagai karunia yang harus diamalkan kepada orang lain, sehingga apabila yang ingin meniru untuk memproduksinya dipersilahkan saja. Mereka tidak khawatir produksi mereka tidak laku karena ditiru, karena keyakinan rejeki sudah diatur oleh Allah SWT. Persepsi masyarakat Pekalongan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dianalisis dari dua sudut pandang yaitu persepsi tradisional dan persepsi modern, dimana kalau dilihat ada pergeseran susut pandang mengenai HKI dalam masyarakat.

a. Persepsi Tradisional Industri Terhadap Merek

Kurangnya pemahaman kalangan industri terhadap HKI inklusif Hak Cipta dan Hak Merek tidak terlepas dari perkembangan HKI itu sendiri, masalah perlindungan terhadap HKI juga masih jauh dari harapan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Kalangan industri belum begitu yakin akan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya

tidak akan dimanfaatkan (dipalsu) oleh pihak lain untuk kepentingan mendapatkan keuntungan. (Abdulkadir Muhamad ;2001;45)

Dengan banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan HKI membuka mata banyak kalangan, bahwa persepsi mereka selama ini terhadap sebuah merek ternyata keliru karena melalui sebuah merek, maka mereka dapat menjalin ikatan emosional dengan konsumen sehingga menimbulkan kesan fanatisme dan sugestif terhadap produk yang bermerek.

b. Persepsi Modern Kalangan Industri Terhadap HKI

Persepsi modern kalangan industri terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) inklusif Hak Cipta dan Hak Merek tidak terlepas dari semakin gencarnya kampanye mengenai pengembangan dan perlindungan HKI, sehingga membangkitkan kesadaran para pelaku industri betapa pentingnya HKI dalam menunjang kelangsungan usahanya.

Perlunya HKI juga disadari oleh kalangan industri akan identitas bagi produknya sehingga dapat dikenal oleh konsumen dan dapat menimbulkan ikatan emosional dari konsumen yang pada akhirnya menumbuhkan kesan sugestif terhadap produk tersebut. Dengan semakin majunya perdagangan menjadikan pelaku usaha Pekalongan menjadari akan pentingnya HKI inklusif Hak Cipta dan Hak Merek, sehingga mendorong mereka untuk mendapatkan HKI guna mengamankan produk mereka dan memenangkan kompetisi persaingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual pada Industri batik di Pekalongan belum sepenuhnya dapat diterapkan, hal itu dikarenakan basis dari usaha batik di Pekalongan sebagian besar adalah kalangan industri rumah

tangga, disamping itu pemahaman mereka akan hak kekayaan intelektual masih sangat kurang.

- b. Dalam implementasi HKI khususnya pada industri batik banyak menemui kendala, kendala yang banyak muncul seperti sistem pemasaran, trend mode, modal dan sumber daya manusia.
- c. Persepsi kalangan usaha batik pekalongan akan pentingnya HKI selama ini masih belum menyeluruh bagi sebagian pihak termasuk golongan “wong kaji”, mereka percaya bahwa rejeki sudah ada yang mengatur, tetapi banyak kalangan pengusaha batik yang sudah menyadari akan pentingnya HKI, karena bagi mereka HKI membawa manfaat dan mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat.

Saran

- a. Perlu sosialisasi lebih efektif bagi pelaku industri batik untuk mengubah persepsi mereka tentang HKI. Pemerintah daerah harus melibatkan semua pihak dalam sosialisasi agar masyarakat menjadi paham akan pentingnya HKI.
- b. Pendaftaran Hak Cipta bagi batik terlebih dulu kepada desain batik khas Pekalongan yang telah menjadi *Public Right* masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ahmad Ramli, *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Nasional*, Makalah ceramah ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996
- Djauhari Oratmangun, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Abad 21*, Makalah seminar sehari ITB, 1998
- Hasanudin, M.Sn., *Batik Pesisiran, Melacak Pengaruh Etos Dagang Santri pada Ragam Hias Batik*, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2001

- Hanafi, Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya, (*Kapita Selekta HKI*), Pusat Studi Hukum UII dan Klinik HKI Jakarta, 2000.
- Hadani Nawawi, *Organisasi dan Pengelolaan Kelas*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Kusnin Asa, *Batik Pekalongan Sebagai Warisan Budaya dan Soko Guru Ekonomi*, Makalah pada Seminar Batik-Festifal Batik Pekalongan, 5 September 2003
- Poerwanto, *Batik Kehilangan Nilai Sakralnya*, Artikel Suara Merdeka, 4 September 1997.
- Rony Hanityo, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Sambutan dalam rangka malam penyambutan peserta Konferensi Internasional Dunia Batik*, di Keraton Yogyakarta, tanggal 2 Nopember 1997.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru*, Untuk Indonesia, 1998
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996
- Sukanto, *Nasiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi*, Integritas press, Jakarta, 1985

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),